

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Indonesia memiliki tiga sektor kekuatan ekonomi, yaitu sektor pemerintah (Badan Usaha Milik Negara), sektor swasta (Badan Usaha Milik Swasta) dan koperasi. Pemerintah berharap ketiga sektor tersebut dapat dikembangkan menjadi komponen yang saling mendukung dan terpadu dalam sistem perekonomian Indonesia.

Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan azas gotong royong dan kekeluargaan memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, tuntutan akan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien pada koperasi semakin meningkat. Adapun jaminan hukum dalam berjalannya koperasi ini telah diatur dalam peraturan perundang - undangan yaitu Undang - Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa :

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”**

Selain itu, koperasi memiliki tujuan utama yaitu, meningkatkan kesejahteraan anggota serta meningkatkan kemakmuran yang adil dan merata bagi segenap anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kesehatan keuangan koperasi menjadi indikator krusial yang mencerminkan kemampuan koperasi dalam menjalankan operasionalnya secara berkelanjutan, memenuhi kewajibannya, dan memberikan manfaat optimal bagi anggotanya. Kesehatan keuangan yang baik memungkinkan koperasi untuk mengakses sumber daya keuangan yang lebih luas, meningkatkan investasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota. Sebaliknya, kinerja manajemen keuangan yang buruk dapat mengancam kelangsungan hidup koperasi, mengurangi kepercayaan anggota dan menghambat pencapaian organisasi, oleh karena itu evaluasi kinerja manajemen keuangan secara berkala dan komprehensif menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap koperasi.

Dalam hal ini, peneliti memilih Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk di teliti. Kopersi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Diponegoro No.22, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115. Dalam kegiatannya Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikelola oleh 3 (tiga) orang Pengurus, 3 (tiga) orang Pengawas, dan pada akhir tahun 2024 koperasi ini beranggotakan 1.065

(seribu enam puluh lima) orang. Anggota dari Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari : Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki 2 unit usaha diantaranya yaitu unit simpan pinjam dan unit niaga barang.

Kesejahteraan anggota dapat tercapai, jika anggota mendapatkan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh anggota, jika anggota berpartisipasi sebagai pemilik dan pelanggan. Menurut (Arifin, 2016) Anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*) yaitu sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan (*user own firm*). Hanel dalam (Arifin, 2013) mengemukakan bahwa anggota sebagai pemilik koperasi memiliki kewajiban untuk merumuskan tujuan koperasi agar sesuai dengan yang diinginkan oleh anggotanya, menetapkan program kerja koperasi sebagai wujud langkah-langkah yang harus ditempuh koperasi sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, memodali dan membiayai koperasi agar program-program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh manajemen koperasi, dan mengawasi atau mengendalikan jalannya koperasi agar selalu berada pada jalur normal, nilai, prinsip, program kerja dan keputusan-keputusan Rapat Anggota. Sedangkan partisipasi anggota sebagai pelanggan adalah sebagai pemasok, pembeli, pemakai jasa, nasabah atau pekerja, tergantung dengan jenis dan usaha koperasinya (Arifin, 2013).

Partisipasi anggota dapat dipengaruhi dan mempengaruhi manfaat ekonomi yang koperasi berikan. Manfaat Ekonomi berupa Manfaat Ekonomi

Langsung dan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung. Manfaat Ekonomi Langsung yaitu manfaat yang langsung diperoleh saat anggota bertansaksi dengan koperasi, misalnya selisih harga, kualitas dan pelayanan yang lebih baik, ketersediaan produk yang lebih terjamin, persyaratan pembayaran yang lebih ringan. Sedangkan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung merupakan manfaat yang diterima tidak langsung pada saat transaksi, tetapi diterima beberapa waktu kemudian seperti Sisa Hasil Usaha (SHU). (Supriyadi, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa :

**“Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh koperasi dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.”**

Sehingga apabila koperasi telah memberikan manfaat ekonomi tidak langsung, maka pendapatan yang koperasi peroleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan akan meningkat apabila anggota berpartisipasi sebagai pelanggan. Dengan demikian untuk melihat perkembangan partisipasi anggota sebagai pelanggan serta Manfaar Ekonomi Tidak Langsung berupa Sisa Hasil Usaha (SHU), maka peneliti melampirkan data perkembangan Pendapatan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 :

**Tabel 1. 1 Perkembangan Pendapatan dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024**

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Pendapatan (Rp)</b>	3.557.932.994	3.823.800.686	1.489.523.017	1.555.146.803	1.704.898.028
<b>N/T (%)</b>		7,47	(61,05)	4,40	9,63
<b>HPP</b>	2.246.808.295	2.395.343.427	2.325.309.582	1.135.569.208	1.135.138.508
<b>N/T (%)</b>					
<b>Biaya-Biaya (Rp)</b>	500.627.892	554.812.775	708.325.421	724.577.352	816.874.172
<b>N/T (%)</b>		10,82	27,67	2,29	12,74
<b>SHU (Rp)</b>	480.703.323	171.568.189	589.332.745	258.485.496	435.673.950
<b>N/T (%)</b>		(64,31)	243,42	(56,14)	68,55

*Sumber : Laporan Keuangan RAT Koperasi KPPP Jawa Barat*

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa barat ini mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar (61,05%) hal ini mengindikasikan adanya faktor negatif yang sangat mempengaruhi pendapatan pada periode tersebut, namun pada tahun 2023 hingga 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,092% dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa adanya pemulihan partisipasi anggota sebagai pelanggan mengalami peningkatan pada tahun tersebut. Pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan pada HPP (Harga Pokok Penjualan), dimana HPP lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan biaya bersifat fluktuasi cenderung meningkat setiap tahun nya , dan pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan Sisa Hasil Usaha mengalami fluktuasi . Pendapatan, HPP dan biaya sangat berpengaruh dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Dengan demikian peningkatan Sisa Hasil Usaha setiap tahunnya akan terjadi. Sehingga koperasi dapat menciptakan manfaat ekonomi tidak langsung bagi anggota dengan adanya sisa hasil usaha yang diberikan oleh koperasi kepada anggota.

Manfaat Ekonomi Tidak Langsung dapat dirasakan oleh anggota, apabila koperasi mengelola modal secara efektif. Ketika koperasi memiliki modal dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, maka anggota akan lebih sering bertransaksi di koperasi. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan anggota tersebut, diperlukannya sejumlah modal yang cukup. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian, maka kontribusi modal dari anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain kontribusi modal dari anggota, modal koperasi terdiri dari modal pinjaman. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah.

Dengan demikian, peneliti melampirkan Sumber Modal Sendiri Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 :

**Tabel 1.2 Sumber Modal Sendiri Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Simpanan Pokok (Rp)</b>	<b>Simpanan Wajib (Rp)</b>	<b>Donasi (Rp)</b>	<b>Dana Cadangan (Rp)</b>
2020	78.761.158,00	12.249.561.187,00	551.675.856,00	228.768.141,48
2021	91.061.158,00	12.306.824.922,00	551.675.856,00	308.885.362,92
2022	107.261.158,00	11.956.740.282,00	551.675.856,00	329.222.526,54
2023	122.061.158,00	11.827.345.922,00	440.965.957,00	459.934.183,23
2024	133.961.158,00	12.550.136.486,00	440.965.957,00	544.232.002,66

*Sumber : Laporan Keuangan RAT Koperasi KPPP Jawa Barat*

Dapat dilihat dari Tabel 1.2, sumber modal sendiri Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terjadi karena anggota berpartisipasi sebagai pemilik dalam bentuk kontribusi modal, seperti pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib.

Dengan demikian peneliti melampirkan Sumber Modal Pinjaman Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.

**Tabel 1.3 Sumber Modal Pinjaman Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Simpanan Sukarela (Rp)</b>	<b>Hutang Dagang (Rp)</b>
2020	-	109.928.584,44
2021	-	164.087.316,16
2022	-	122.424.283,85
2023	600.000,00	109.053.945,31
2024	5.800.000,00	100.887.909,41

Dapat dilihat dari Tabel 1.3, sumber modal pinjaman Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berasal dari anggota berupa simpanan sukarela cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi

karena meningkatnya anggota yang menyimpan dananya kepada koperasi. Sedangkan modal pinjaman yang berasal dari bank mengalami penurunan setiap tahunnya karena koperasi setiap tahunnya tidak memiliki modal pinjaman dari bank. Tidak adanya modal pinjaman yang berasal dari bank, disebabkan karena koperasi merasa bahwa dengan menggunakan modal sendiri dari anggota sudah cukup untuk memodali kegiatan usahanya. Dengan demikian peneliti melampirkan Tabel perkembangan modal sedniri dan modal pinjaman Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024:

**Tabel 1. 4 Perkembangan Modal Sedniri dan Modal Pinjaman Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024**

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	Modal Pinjaman (Rp)	Proporsi Modal Sendiri (%)	Proporsi Modal Pinjaman (%)
2020	13.108.766.342,48	-	100	0
2021	13.258.447.298,92	-	100	0
2022	12.944.899.822,54	-	100	0
2023	12.886.307.220,23	600.000,00	99,99	0,01
2024	13.669.295.603,66	5.800.000,00	99,95	0.042

*Sumber : Laporan Keuangan RAT Koperasi KPPP Jawa Barat*

Perkembangan proporsi modal sendiri mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan ini mencerminkan bahwa adanya partisipasi aktif anggota dalam kontibusi modal dan menunjukkan tingkat kepercayaan anggota yang tinggi terhadap koperasi. sedangkan proporsi modal pinjaman selama 3 tahun koperasi tidak memiliki modal pinjaman, ketika modal pinjaman mulai muncul pada tahun 2023-2024 jumlah dan proporsinya sangat kecil hal ini,



menunjukkan bahwa koperasi sangat konservatif dalam mengambil utang eksternal dan lebih memanfaatkan dana internal untuk operasinya. Sehingga, untuk mengetahui hubungan antara partisipasi dengan manfaat ekonomi tidak langsung. Maka akan digunakan pendekatan *Economic Value added* (EVA).

Menurut Arifin, (2016) *Economic Value added* (EVA) merupakan alat pengukuran kinerja perusahaan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan dari sisi kepentingan dan harapan penyandangan dana (kreditur dan pemegang saham). Tunggal (dalam Zakaria Hamzah & Awaliyah, 2020) berpendapat bahwa *Economic Value added* (EVA) adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi (*operating cost*) dan biaya modal (*cost of capital*). Berdasarkan pengertian tersebut, konsep *Economic Value added* (EVA) ini dapat membantu koperasi untuk lebih memfokuskan perhatiannya dalam meningkatkan nilai koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota serta partisipasi anggota dengan menggunakan ukuran tertimbang (*weighted*).

Hasil perhitungan EVA ini dapat mencerminkan partisipasi anggota dengan manfaat ekonomi tidak langsung yang koperasi berikan kepada anggotanya. Karena jika  $EVA > 0$ , maka koperasi memberikan METL kepada anggotanya. Apabila  $EVA = 0$ , maka koperasi belum memberikan METL namun biaya modal sudah terpenuhi. Sedangkan, jika  $EVA < 0$ , maka koperasi tidak memberikan METL dan tidak memenuhi biaya modal. EVA dipengaruhi

oleh SHU dan biaya modal, sehingga jika koperasi ingin memberikan METL kepada anggotanya maka SHU harus meningkat dan biaya modal tetap, atau SHU meningkat dan biaya modal meningkat (peningkatan biaya modal lebih kecil dari peningkatan SHU), adanya peningkatan SHU dan penurunan biaya modal.

Menurut penelitian terdahulu yang dikemukakan dalam jurnal, terkait dengan partisipasi anggota dan manfaat ekonomi tidak langsung menggunakan pendekatan *Economic Value Added* (EVA) adalah sebagai berikut :

1. Sherina Mutia Khairani 2020 dengan judul penelitian “ Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Melalui Pendekatan *Economic Value Added* (EVA) dan kaitannya dengan Manfaat Ekonomi Bagi Anggota”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Berdasarkan perhitungan kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Economic Value Added* (EVA) koperasi memiliki nilai EVA positif, dimana dapat dikatakan bahwa koperasi mampu memberikan keuntungan berupa nilai tambah ekonomis bagi anggotanya.
2. Maulidah Wati Handayani 2021 dengan judul penelitian “ Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Menggunakan Metode *Economic Value Added* (EVA) dan kastannya dengan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dari hasil perhitungan kinerja keuangan dengan menggunakan *Economic Value Added* (EVA), menunjukkan hasil negatif. Artinya koperasi belum mampu memberikan nilai tambah ekonomi karena

pendapatan koperasi lebih kecil dibandingkan dengan biaya modalnya. Namun sisa hasil usaha setiap tahunnya bernilai positif. Dengan demikian, nilai negatif EVA menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan koperasi lebih kecil dibandingkan dengan biaya modal.

3. Lia Rahmawati, dkk dengan judul penelitian “ Hubungan Partisipasi Anggota Koperasi dengan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pegawai Negeri Juanda di SMA Negeri 3 Samarinda”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggota mempunyai hubungan yang positif dengan sisa hasil usaha, karena hasil perhitungan partisipasi anggota tinggi sehingga menyebabkan sisa hasil usaha yang diterima anggotanya juga tinggi.

Karena dengan meningkatnya pendapatan koperasi, menunjukkan bahwa partisipasi anggota sebagai pelanggan mengalami peningkatan. Apabila pendapatan meningkat dan biaya lebih kecil dibandingkan pendapatan, maka koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi tidak langsung bagi anggotanya. Sehingga koperasi perlu mengetahui faktor yang memengaruhi partisipasi anggota dan manfaat ekonomi tidak langsung, agar nilai EVA bernilai positif. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Anggota dengan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung Anggota Melalui Pendekatan *Economic Value added* ( EVA )” pada Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa barat.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik dan Pengguna Jasa Terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung.
2. Faktor apa yang Mempengaruhi Manfaat Ekonomi Tidak Langsung dengan Menggunakan Metode *Economic Value Added* (EVA).
3. Kebijakan Manajemen dalam Meningkatkan *Economic Value Added* (EVA).

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan dan mengarahkan pada hasil dari penelitian tersebut. Adapun maksud dan tujuan penelitian, antara lain sebagai berikut

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguji hubungan antara partisipasi anggota dengan manfaat ekonomi tidak langsung bagi anggota melalui pendekatan *Economic Value Added* (EVA).

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Dengan maksud penelitian tersebut, maka adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Faktor yang Memengaruhi Manfaat Ekonomi Tidak Langsung dengan menggunakan Metode *Economic Value Added* ( EVA ).
2. Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik dan Pengguna Jasa Terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung.
3. Kebijakan Manajemen dalam Meningkatkan *Economic Value Added* ( EVA ).

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan peneliti tentang teori dan praktik manajemen keuangan khususnya tentang hubungan antara partisipasi anggota dengan manfaat ekonomi tidak langsung.
2. Sebagai sumber informasi untuk penelitian lanjut tentang subjek ini atau sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin menyelidiki subjek yang sama.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan koperasi dalam mengambil keputusan dan masukan dalam pemecahan masalah pada Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.